

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HABITUS PIERRE BOURDIEU DAN TAFSIR KEBUDAYAAN CLIFFORD GEERTZ

Oleh:
Yeni Susanti¹

ABSTRACT

This research is motivated by ethnicity, race, religion, language, and life values in Indonesia which often give rise to various conflicts. One of Indonesia's unity which contains a potential threat to the country's unity is religion, so to avoid conflict and disharmonization it is necessary to foster a moderate, inclusive way of faith or an open religious attitude, which is called an attitude of religious moderation. This research will describe the results of the analysis of the implementation of various moderations from the perspective of Pierre Bourdieu's habits and Clifford Geertz's culture using a qualitative descriptive approach. The research subjects, who were then called informants, were obtained through a purposive sampling technique with the criteria that the informants were people who understood the concept and implementation of religious moderation in the city of Surakarta as well as the general public. Data sources consist of primary and secondary data. Primary data was obtained from data collection through interviews and observations, while secondary data was obtained through a literature study. Based on the results of data analysis, it is explained that religious moderation is understood as a balanced religious attitude between the practice of one's religion (exclusive) and respect for the religious practices of other people with different beliefs (inclusive) which becomes a guideline for the behavior of every religious community which then becomes culture as per Clifford Geertz's concept of culture. Religion is a whole of knowledge that is passed down from generation to generation in symbolic form or what Bourdieu calls habitus that resides in the mind of the actor (individual).

Keywords: religious moderation, habits, culture

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragaman etnis, suku, ras, agama, bahasa dan nilai-nilai hidup yang ada di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Salah satu keragaman Indonesia yang mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara adalah agama, maka untuk menghindari konflik dan disharmonisasi perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisa implementasi moderasi beragama dari prespektif habitus Pierre Bourdieu dan kebudayaan Clifford Geertz dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yang kemudian disebut dengan informan diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan kriteria bahwa informan adalah orang yang memahami konsep dan implementasi moderasi beragama di Kota Surakarta serta masyarakat umum. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Berdasarkan hasil analisis data dijelaskan

¹ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta, Indonesia (yeni.socio@gmail.com)

bahwa moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) menjadi pedoman berperilaku setiap umat beragama yang kemudian menjadi kebudayaan sebagaimana konsep budaya Clifford Geertz. Agama sebagai keseluruhan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk simbolik atau yang oleh Bourdieu disebut sebagai habitus yang berada di dalam pikiran aktor (individu).

Kata Kunci: moderasi beragama, habitus, kebudayaan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan studi tentang budaya mengkaji masalah sosial politik, agama, etnis, gender, sastra dan budaya itu sendiri menjadi sebuah teks yang saling berkaitan. Para peneliti sosial budaya seperti halnya Pierre Bourdieu dan Clifford Geertz menggunakan kajian ini sebagai kritik atas positivisme ilmiah pada era modern yang menjunjung tinggi adanya spesialisasi. Pemikiran Bourdieu itu dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu diantaranya sejarah, sosiologi, hukum dan kriminologi. Teori Bourdieu mengungkapkan “praktik manusia” dengan memadukan teori yang berpusat pada aktor/agen dan teori yang menekankan dimensi struktur pembentuk kehidupan sosial masyarakat atau teori objektivisme (Farid, 2021:281).

Bourdieu mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk praksis sosial menjadi empat yaitu habitus, arena, kekerasan simbolik, modal dan strategi. Keempat unsur tersebut secara epistemologis dikembangkan sebagai pisau analisis terhadap fenomena sosial budaya di lingkungan masyarakat tertentu secara komprehensif. Inti pemikiran Bourdieu terletak pada konsep habitus dan arena serta hubungan dialektis diantara keduanya. Habitus berada di dalam pikiran aktor/agen sedangkan arena berada di luar pikiran mereka (Lubis, 2014:98).

Berkaitan dengan pemikiran Bourdieu, Clifford Geertz juga mengkaji mengenai simbol-simbol. Geertz menyumbangkan banyak teori sosial budaya dan memberikan pengaruh besar dalam mengubah konsep antropologi kepada suatu keperihatinan dalam kerangka makna bahwa manusia hidup di luar dari kehidupan mereka. Secara umum Geertz menyatakan bahwa manusia dan masyarakat terbentuk dengan simbol-simbol tertentu. Simbol meliputi objek, peristiwa, kualitas, aksi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan konsepsi. Geertz (1993:90) memaknai konsepsi adalah simbol.

Geertz dalam Ramli (2012) mengemukakan bahwa kebudayaan berkaitan erat dengan simbol atau lambang. Dengan simbol inilah manusia saling menyampaikan fikiran, perasaan dan berkomunikasi. Kebudayaan tidak terjadi dengan kebiasaan, tetapi berdasarkan tafsiran atau interpretasi sebuah masyarakat terhadap sesuatu pengalaman. Geertz melihat kebudayaan sebagai teks sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk menangkap makna yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan dilihatnya sebagai jaringan makna simbol yang dalam penafsirannya perlu dilakukan suatu pendeskripsian yang sifatnya mendalam.

Konsep habitus dan kebudayaan tersebut akan menjadi pijakan penulis untuk mengkaji mengenai isu-isu diskriminasi, konflik dan kekerasan berlatarbelakang agama hingga melahirkan gerakan moderasi beragama di Indonesia. Keragaman etnis, suku, ras, agama, bahasa dan nilai-nilai hidup yang ada di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun untuk mewujudkan integrasi. Masyarakat Indonesia masih kental dengan prasangka antara kelompok dan rendahnya sikap saling menghargai atau toleransi.

Salah satu keragaman Indonesia yang mengandung potensi ancaman bagi persatuan negara adalah agama. Penelitian Yunus (2014) menyebutkan ada beberapa kasus besar mengenai konflik agama seperti kasus Poso di Ambon, Sunni di Jawa Timur, GKI Yasmin di Bogor dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman konflik tersebut menjadi dorongan untuk membangun kesadaran masyarakat agar menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebinekaan. Konteks agama, maka untuk menghindari konflik dan disharmonisasi perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Berdasarkan gambaran tersebut maka moderasi beragama menjadi jalan tengah diantara keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya yang berjalan seiring, dan tidak saling mendiskriminasi antara agama dan kearifan lokal serta tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.

Kota surakarta dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 yang dilakukan oleh SETARA Institute menjadi salah satu kota

yang memiliki tingkat toleransi yang baik. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mendeskripsikan bagaimana Kota Surakarta mengimplementasikan program moderasi beragama dan selanjutnya akan penulis analisis dengan prespektif habitus Pierre Bourdieu dan kebudayaan Clifford Geertz

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Waridin dan Tablani dalam Fadli (2021) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian ini selanjutnya menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan hasil dari penyelesaian masalah berdasarkan penyajian data, analisis dan interpretasi (Narbuko dan Achmadi, 2002: 44).

Subjek dari penelitian ini, kami sebut sebagai informan atau orang yang akan memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti. Informan tersebut kami peroleh dengan teknik purposive sampling dengan kriteria bahwa informan adalah orang yang memahami konsep dan implementasi moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dan masyarakat umum. Peneliti akan meminta izin terlebih dahulu sebelum menggali informasi dengan cara menghubungi informan baik melalui surat resmi maupun melalui media telekomunikasi. Sumber data menurut

Rahmadi (2011) didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Siyoto, Sandu dan Ali Sodik (2015) menuliskan pembagian jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari informan serta data sekunder diperoleh dari hasil revidi jurnal, buku dan artikel mengenai moderasi beragama.

3. HASIL

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kementerian Agama Kota Surakarta terletak Jl. Ki Mangun Sarkoro No.115, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138. Dikepalai oleh H. Hidayat Maskur, S.Ag, M.S.I. Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagaimana pasal 396 ayat (2) huruf ii terdiri atas : a) Subbag Tata Usaha; b) Seksi Pendidikan Madrasah; c) Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; d) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f) Penyelenggara Syariah; g) Penyelenggara Kristen; h) Penyelenggara Katolik; dan i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Surakarta dalam penelitian Baidhawiy (2018), hingga kini kota Surakarta masih didominasi oleh penduduk beragama Islam dengan jumlah 412.283 (73,18%). Peringkat

kedua diduduki oleh Kristen Katolik sebesar 74.355 (13,19%). Berikutnya berturut-turut ditempati oleh Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk sebesar 69.971 (12,42%), Budha sebesar 4.605 (0,81%), dan Hindu sebesar 2.141 (0,38%).

3.2 Implementasi Moderasi Beragama dalam Perspektif Habitus dan Kebudayaan

Kota Surakarta memiliki keragaman yang beraneka, mencakup ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi kekuatan integrasi yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya konflik antar agama, budaya, antar ras, etnik dan antar ideologi hidup. Sebagai kota yang plural dengan julukan Kota Budaya, Surakarta memiliki dua modalitas penting dalam membentuk karakter multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal (local wisdom). Karakter tersebut diyakini sebagai nilai yang dapat menjaga kerukunan umat beragama. Keragaman di Kota Surakarta, secara historis dan sosiologis dihuni mayoritas umat beragama Islam, namun jika dilihat spesifik perdaerah, maka terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut.

Keragaman di atas sering menjadi latar belakang berbagai konflik di Indonesia. Konflik yang terjadi sering sekali didasari faktor perbedaan agama/ keyakinan. Konflik keagamaan umumnya dipicu adanya sikap beragama yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran. Keanekaragaman disisi lain juga menjadi rahmat dan menjadi keunikan serta kekuatan bangsa jika dapat dikelola

dengan benar. Oleh karena itu masyarakat perlu penyadaran untuk bersikap moderat yaitu mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Akhir-akhir ini perkembangan moderasi menjadi wacana yang ramai dibicarakan dalam konteks moderasi keagamaan

3.3 Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip moderasi beragama yang pertama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan misalnya antara jasmani dan rohani, antara akal dan wahyu, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kepentingan bersama, antara gagasan ideal dan kenyataan, dan seterusnya. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan yaitu istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan (Kemenag RI, 2019:19). Dilihat dalam konteks bernegara, kedua prinsip moderasi ini telah memberikan dampak besar pada masa awal kemerdekaan karena telah mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki beragam pendapat, ide, kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soekanto dalam Kiranantika (2022) yang menjelaskan bahwa sejatinya, konsep interseksionalitas dapat digunakan untuk melakukan reintegrasi sosial.

Prinsip-prinsip moderasi beragama ini juga sangat sesuai dengan ide utama konsep interseksionalitas yaitu meliputi ketidaksetaraan sosial, persilangan hubungan kekuasaan (struktural, disiplin, budaya dan antarpribadi), konteks sosial, relasionalitas, keadilan sosial, dan kompleksitas. Moderasi

beragama menjadi interseksionalitas yang dapat menciptakan identitas baru masyarakat Indonesia khususnya di Kota Surakarta yaitu masyarakat yang moderat.

3.4 Landasan Moderasi Beragama dalam Budaya Berbagai Agama

Agama yang diakui di negara Indonesia hingga saat ini antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada sang Maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, tetapi menjadi budaya berbagai agama. Pertama, Islam mengajarkan agar senantiasa bersikap moderat. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi.

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu” (Al-Baqarah, 2: 143).

Ayat di atas menjadi salah satu dasar agar umat Muslim selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik.

Diskursus moderasi juga menjadi budaya agama Kristen. Moderasi beragama dalam keyakinan Kristen menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Alkitab telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai dan itulah yang menjadi keyakinan umat Kristiani. Umat Kristiani menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam konteks kedamaian (Kemenag RI, 2019:30).

Adapun dalam budaya Hindu, dasar moderasi beragama sebagai jalan tengah dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Moderasi beragama bagi umat Hindu mengarah pada upaya memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama mereka. Moderasi pada kalangan umat Hindu mengikuti kerangka pembangunan peradaban dengan aspek pembangunan sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan. Ajaran agama Hindu yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah susila yaitu bagaimana mereka menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan (Kemenag RI, 2019:35).

Moderasi beragama dalam budaya agama Buddha didasarkan pada ajaran mengenai spirit agama yaitu Metta yaitu sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa adanya pilih kasih. Ajaran dalam Metta berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut meliputi toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan (Kemenag RI, 2019:37).

Moderasi beragama juga mengakar dalam budaya agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang beriman dan luhur budi memandang kehidupan ini dalam kaca mata yin yang, yaitu sikap tengah dan bukan sikap ekstrem. Khonghucu, menyakini bahwa harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (Kemenag RI, 2019:41).

Demikianlah landasan-landasan moderasi beragama dari sudut pandang berbagai agama di Indonesia. Semua itu menjadi pedoman berperilaku setiap umat beragama yang kemudian menjadi kebudayaan sebagaimana konsep budaya Clifford Geertz.

3.5 Urgensi Moderasi Beragama

Moderasi beragama sangat penting dilakukan salah satunya di Kota Surakarta karena berdasarkan fakta bahwa masyarakat Surakarta sangat majemuk dengan berbagai identitas. Hampir seluruh aktivitas keseharian kehidupan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Agama menjadi sangat vital bagi Indonesia sehingga moderasi beragama sangat penting untuk digaungkan dalam konteks global dimana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat.

Praxis agama di Indonesia saat ini masih terus menghadapi tantangan yang serius yaitu berkaitan dengan gejala intoleransi dari kelompok-kelompok Islam radikal. Radikalisme yang muncul dalam bentuk terorisme sering mengatasnamakan agama merupakan pertanda nyata bahwa intoleransi perlu dicegah sejak dini. Sikap intoleransi inilah yang akan mengancam eksistensi keragaman atau pluralitas di Indonesia. Menurut Samho (2022:106) potensi radikalisme menyusup melalui wacana intoleransi ke lembaga pendidikan formal melalui aktivitas kaderisasi, siraman rohani di tempat-tempat ibadah yang dikuasai oleh kelompok radikal, buku, serta pemanfaatan berbagai jenis sosial media dan juga berbagai situs di internet.

Hasil penelusuran penelitian Samho (2022:107) ditemukan histori kekerasan aksi terorisme berlatarbelakang agama yang

terjadi di Indonesia mulai dari Bom Bali I dan II (2018), bom di Mako Brimob (9 Mei 2018), teror bom bunuh diri di tiga lokasi Gereja di Surabaya (13 Mei 2018), bom bunuh diri yang terjadi di Mapolrestabes Surabaya (14 Mei 2018), serangan teroris ke Mapolda Riau (16 Mei 2018), dan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar (28 Maret 2021). Peristiwa-peristiwa tragis di atas merupakan fakta nyata bahwa secara horizontal agama sesungguhnya menyimpan potensi konflik sehingga moderasi beragama menjadi penting.

Sejarah kekerasan sudah mulai muncul di Surakarta sejak pertengahan abad 18. Konflik kali pertama yang mengawali kelahiran kota ini adalah pemberontakan etnik Cina terhadap karaton Kartasura. Konflik tersebut terus berulang hingga adanya peristiwa 14-15 Mei 1998. Ini merupakan peristiwa mutakhir beberapa hari menjelang runtuhnya rezim Orde Baru dan Soeharto. Selain faktor etnis konflik di Kota Surakarta juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan agama. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusriani, et al (2012) menjelaskan tentang konflik antar pemeluk agama di Surakarta. Konflik yang paling sering terjadi adalah konflik pemeluk agama Islam dan Kristen berkaitan pembangunan tempat ibadah. Pada bulan Desember 2010, pembangunan gereja di pinggir kali daerah Sangkrah di protes dan di datangi kelompok laskar. Konflik terjadi karena kelompok laskar memprotes di banggunya gereja karena sejak musibah banjir, umat Kristen yang tinggal di bantaran kali sudah direlokasi ke tempat lain.

3.6 Tantangan Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital

Saat ini kompleksitas kehidupan beragama menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrem. Kondisi saat ini sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena sekarang dunia tengah memasuki era disrupsi yaitu era dimana teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kehidupan kini telah memasuki revolusi industri digital 4.0. Nisa, et al (2018) menampilkan hasil survei PPIM 2017 yang menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya radikalisme dan intoleransi generasi Z.

Berita dan konten keagamaan yang radikal serta ekstrem menjadi mudah dikonsumsi tanpa ada konsultasi dengan otoritas-otoritas keagamaan tradisional yang ada. Akibatnya, pemikiran keagamaan sebagian kelompok terutama kaum millennial cenderung radikal dan ekstrem. Kehidupan beragama di Indonesia juga menghadapi tantangan serius berupa semakin menguatnya sikap eksklusivisme dan ekstremisme beragama. Era ini masyarakat juga mengalami perubahan sikap menjadi serba instan. Budaya instan yang dirasa praktis tercipta dari revolusi digital telah membuat masyarakat cenderung menyukai berita melalui sosial media dibandingkan media masa. Mereka cenderung menyukai judul berita yang bersifat provokatif dan heboh. Sebagian besar masyarakat langsung mempercayai isi konten yang terdapat sebuah berita di internet atau sosial media tanpa melakukan verifikasi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya berita hoaks beredar di mana-mana dan merusak pemahaman masyarakat mengenai keagamaan.

Tantangan-tantangan yang telah diuraikan di atas menuntut agar setiap orang

memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi habitus lama tersebut tertantang oleh munculnya kebiasaan-kebiasaan baru sehingga kehilangan lagi relevansinya pada era sekarang.

3.7 Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan, pelembagaan, dan implementasi moderasi beragama, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat, bangsa dan negara menjadi pekerjaan yang sangat krusial. Praktik moderasi beragama dengan semua tradisinya tidak dapat terjadi begitu saja secara alamiah, melainkan harus dipraktikkan sejak nilai-nilai setiap individu warga bangsa dibentuk. Sikap toleransi dan inklusif yang dibangun melalui kesadaran subjektif ini menekankan adanya hubungan timbal balik antara pelaku dan struktur obyektif dalam konteks ini adalah agama sebagai keseluruhan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk simbolik atau yang oleh Bourdieu disebut sebagai habitus yang berada di dalam pikiran aktor (individu). Konsep inilah yang mendasari munculnya strategi penguatan moderasi beragama yang pertama yaitu melalui unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Habitus moderat mulai dibangun sejak individu memutuskan membangun sebuah keluarga yang kemudian di simbolkan sebagai "keluarga sakinah".

Kedua, strategi penguatan moderasi beragama juga semakin massif baik yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan melalui pendidikan karakter maupun melalui literasi keagamaan berupa dakwah-dakwah baik secara personal, atau lembaga

pesantren dan masjid secara kelembagaan. Ketika guru dan da'i mengajarkan sikap moderat maka hal itu disebut sebagai kesadaran habitus. Guru dan da'i tentu saja memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai agama dan bagaimana bersikap moderat. Hal itu menjadi modal simbolik. Penguatan moderasi beragama pada strategi ini dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi serta dakwah yang dilaksanakan pada perkumpulan pengajian-pengajian. Tempat-tempat itulah yang kemudian menurut konsep Bourdieu disebut sebagai arena (field).

Strategi ketiga adalah melalui Kementerian Agama yang berupaya mengajak masyarakat untuk lebih menyadari bahwa umat beragama dalam kehidupan bangsa ini tidak hanya satu, tetapi sangatlah banyak dan tentu saja berbeda-beda. Selain itu, pemerintah aktif memfasilitasi adanya peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan mensosialisasikannya. Pada tahap ini sikap toleransi, inklusif, ramah dan nirkekerasan mulai membentuk struktur yang mengkonstruksi pikiran individu. Nilai-nilai, norma-norma dan peraturan yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan itu menjadi seperangkat mekanisme kontrol terhadap perilaku masyarakat sehingga dapat disebut sebagai kebudayaan. Kebudayaan tersebut mampu diorganisasikan serta dipersepsikan oleh setiap individu melalui pola pikirnya. Geertz (1992:55), mengemukakan bahwa konsep kebudayaan secara khusus diartikan sebagai seperangkat mekanisme kontrol, yaitu meliputi rencana, resep, aturan, dan instruksi atau program-

program untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Strategi keempat mengenai penguatan moderasi beragama adalah penekanan pada reformasi birokrasi, terutama mengenai peran ASN (Aparatur Sipil Negara) dan TNI/Polri. Kedua institusi tersebut dipandang sebagai kelompok strategis yang memiliki peran penting dalam reformasi birokrasi. ASN bertugas untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan hak sipil dan hak beragama semua umat beragama, sedangkan TNI/Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sebagai aparat birokrasi mereka semestinya mampu menjadi fasilitator perubahan sosial melalui kemampuan interseksionalitas. Birokrasi sebagai struktur sosial niscayanya dapat menekan ketidaksetaraan baik berdasarkan gender, ras, etnis, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, kelas, dan bentuk diskriminasi lainnya. Dengan demikian reformasi birokrasi dapat menjadi bentuk interseksionalitas yang sesuai dengan konsep Crenshaw dan Collins.

Strategi kelima adalah melalui literasi keagamaan dan sosialisasi. Literasi keagamaan merupakan kemampuan memahami ajaran agama yang diperoleh melalui pengajaran agama (religious learning) dan kemampuan memahami ajaran agama dalam konteks pelaksanaannya didapati melalui belajar tentang agama (learning about religion). Literasi keagamaan menjadi langkah konkret agar masyarakat melek agama yang semuanya bertujuan dalam rangka penguatan keberagaman yang moderat. Agama perlu dikembalikan pada perannya sebagai panduan moral dan spiritualitas, bukan hanya pada aspek ritual dan formal yang mudah diakses untuk semua

kalangan masyarakat. Sosialisasi juga menjadi strategis untuk memperkuat implementasi moderasi beragama. Sosialisasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai workshop maupun Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan literasi keagamaan melalui habitus membaca menjadi sangat masuk akal untuk menumbuhkan sikap moderat. Sementara buku bacaan baik berupa cetak maupun digital serta ruang-ruang workshop dan FGD menurut konsep Bourdieu juga menjadi arena (field).

Chudzaifah dan Hikmah (2022) menghimpun data mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Tahun 2021. Hasil survey tersebut terlihat bahwa Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2021 masuk pada kategori baik. Nilainya berada pada rerata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keberagaman di Indonesia saat ini berada dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan sikap toleransi dan kerjasama yang cukup tinggi dikalangan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut dapat dipertahankan ketika interseksionalitas dijadikan pijakan dasar dalam berinteraksi sosial, sehingga perbedaan ras, gender, etnis, seksualitas, kelas sosial, agama, dan identitas lainnya dapat dicermati perbedaannya.

4. KESIMPULAN

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Landasan-landasan pada setiap agama menjadi pedoman berperilaku setiap umat beragama yang kemudian menurut Clifford

Geertz menjadi kebudayaan. Moderasi beragama menjadi sangat urgen karena terdapat fakta adanya peristiwa-peristiwa tragis berupa konflik dan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh agama. Moderasi beragama juga memiliki tantangan berat di era disrupsi digital karena perkembangan teknologi dan informasi memberikan pengaruh besar terhadap tumbuhnya sikap intoleransi dan radikalisme. Kondisi tersebut

mendorong agar penguatan moderasi beragama terus digerakan melalui strategi-strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat dimulai dari pembiasaan hingga membentuk habitus pada setiap individu, pendidikan karakter moderat melalui sektor pendidikan, penyesuaian dan mempertegas kebijakan, literasi keagamaan dan sosialisasi serta melalui reformasi birokrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. 2012. Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu. *Biokultur*, 1(2), 91-110
- Akhmadi, Agus. 2019. Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55
- Bourdieu, Pierre. 1990. *The Logic of Practice*. California: Atanford University Press.
- Chudzaifah, Ibnu dan Afroh Nailil Hikmah. 2022. Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagaman di Indonesia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 49-56
- Crenshaw, Kimberle. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicgo Legal Forum*, 140, 139–167.
- Farid, Muhammad. 2021. Implementasi Teori Bourdieu dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Sunan Muria pada Masyarakat Piji Wetan Desa Lau Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian*, 12(2), 279-298
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius Press
- Geertz, Clifford. 1993. *Religion as a Cultural System the Interpretation of Cultures*. Fontana Press
- Kiranantika, Anggaunita. 2022. Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)*, 4(1), 48-55
- Kuper, Adam. 1999. *Culture*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lubis, Ahyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme, Teori dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo
- Muharis. 2023. Menciptakan Habitus Moderasi Beragama: Upaya Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dalam meneguhkan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. *Islam & Contemporary Issues*, 3(1), 1-8.

- Nasruddin. 2011. *Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz*. *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, 1(1), 33-46
- Nisa, Yunita Faela, dkk. 2018. *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta
- Ramli, Yusri Mohamad. 2012. *Agama dalam Tentukur Antropologi Simbolik Geertz*. *International Journal of Islamic Thought*, 1, 62-73.
- Ritzer, George dan Donglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Samho, Bartolomeus. 2022. *Urgensi “Moderasi Beragama” untuk Mencegah Radikalisme di Indonesia*. *Sapientia Humana: Jurnal Sosio Humaniora*, 2(1), 90-111
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Yosia, Adrianus. 2020. *Mendedah Lokalitas, Menuju Interseksionalitas (Suatu Usulan Heuristik Lintasan Berteologi dalam Konteks Bagi Kaum Tionghoa-Injili Indonesia Lewat Kacamata Interseksionalitas)*. *Indonesian Journal of Theology*, 8(2), 198-230.
- Yunus, Firdaus M. 2014. *Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya*. *Substantia*, 16(2), 217-228.